

Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (Srikandi) Sebagai Upaya Mitigasi Arsip Kebencanaan

Dian Aristriya¹, Tuswoyo²

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Administrasi STIAMI, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia.

Email : ²tuswoyo@stiami.ac.id

*Corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Implementation;
Policy;
Mitigation;
Archive.

The background of this research departs from the phenomenon of the implementation of the use of the Dynamic Archives General Application (SRIKANDI) which is not optimal because the level of employee knowledge about this application is still low. The purpose of this study is to analyze and describe the low level of employee knowledge of employees towards the SRIKANDI application. This research uses a qualitative research approach which is a research process to gain understanding based on methods that investigate a phenomenon that occurs. Participants in this study amounted to 4 people using interviews, observation, documentation and literature studies. The results of research on the implementation of the SRIKANDI Application policy in BNPB in terms of communication, resources, disposition and bureaucratic structure, were concluded to have run quite well despite several obstacles such as communication constraints, internet disconnection or system down, limited resources, resistance to changes from users. But obstacles can be overcome continuously. The author suggests the need to increase the capacity of individuals and organizations in using the SRIKANDI application through structured and continuous training, building collaboration with other institutions that use similar applications to share knowledge, experience, and best practices in disaster archive management and providing constructive feedback to application developers.

This is an open access article under the [BY-NC-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan resiko bencana alam yang cukup tinggi dikarenakan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik sehingga menjadi *supermarket* bencana dimana semua jenis bencana ada. Data menunjukan bahwa jumlah kejadian bencana di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021 dengan rincian tahun 2019 terjadi 3814 kali bencana, tahun 2020 terjadi 4650 bencana, dan pada tahun 2021 telah terjadi 5402 bencana. Data dan informasi seputar kebencanaan yang terjadi di Indonesia dapat diakses melalui layanan website dibi.bnpb.go.id yang saat ini dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemanfaatan teknologi dan informasi oleh pemerintahan perlu didukung perubahan mendasar dalam bentuk reformasi. Tanpa dukungan reformasi, tujuan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pemerintah akan sulit tercapai. Untuk mendapatkan manfaat teknologi informasi, pemerintah Indonesia melakukan reformasi birokrasi dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mendukung dan melaksanakan program SPBE yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari hasil monitoring dan evaluasi SPBE 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperoleh nilai indeks sebesar 2,68 (predikat baik).

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) telah digunakan oleh Bagian Tata Usaha dan Kearsipan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana sejak tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Namun baru mulai rutin digunakan setelah diterbitkan Instruksi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 27 Agustus 2021.

Penggunaan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (SRIKANDI) ini sangat membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara penanggulangan bencana dalam upaya mitigasi arsip- arsip kebencanaan.

KAJIAN LITERATUR

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, menampung aspirasi, serta mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Kebijakan publik yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah kebijakan publik atau umum.

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017:166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinankemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Kebijakan publik dalam penelitian ini dapat diartikan serangkaian keputusan yang diambil oleh instansi pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangan, program-program dan tindakan yang digunakan sebagai pedoman untuk mendukung tindakan aparat pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dalam rangka memecahkan suatu masalah dalam kehidupan masyarakat yang masih berada dalam wilayah wewenangannya.

Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan dapat ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang dapat diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan (Agus Subianto, 2020:34).

Model Implementasi Kebijakan

Model pendekatan Donald van Metter & Carl van Horn (1975) menjelaskan bahwa proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik/kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik

Model George C. Edward III (1980) – *Direct and Indirect Impact of Implementation* Pendekatan

yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : 1). Komunikasi, 2). Sumber daya, 3). Disposisi, 4). Struktur birokrasi

Sistem Informasi Terintegrasi

Menurut Kurniawan (2017:14), system informasi terintegrasi merupakan sebuah *Platform* teknologi yang memungkinkan organisasi/perusahaan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan proses bisnis yang dimiliki.

Sistem informasi berperan penting dalam mendukung kinerja organisasi atau perusahaan dengan kegiatan bisnis yang dimiliki dan teknologi yang mendukungnya. Sehingga organisasi harus mengembangkan dan menyebarkan sistem informasi terintegrasi yang berkualitas, efisien, handal dan cepat untuk meraih keunggulan kompetitif (Hartono:2019:4).

Tata Naskah Dinas

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerangkan bahwa Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi peraturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Sedangkan pengertian Tata Naskah Dinas Elektronik dalam peraturan tersebut yaitu pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.

Mitigasi Resiko

Menurut Opan Arifudin (2020:68), Mitigasi risiko merupakan strategi dalam meminimalisir adanya dampak negatif yang telah terjadi. Sehingga proses ini memiliki hubungan erat dengan pengendalian internal.

Menurut Suryanto (2021:78), Hubungan keduanya terkait pada kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan (*preventive action*) atau menerapkan sistem peringatan dini (*early warning system or alert system*).

Menurut Saryanto (2021:80), Pada kegiatan manajemen risiko, ketika mengetahui adanya sebuah risiko memerlukan serangkaian proses. Hal ini terkait beberapa tahap dalam mitigasi risiko, mulai dari pengenalan risiko hingga keputusan akhir untuk menangani risiko. Berikut ini tahap-tahap mitigasi risiko: a). Identifikasi risiko, b). Pengukuran risiko, c). Pemantauan risiko, d). Pengendalian risiko, e). Penentuan limit risiko

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan rencana penelitian yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor (Abdussamad, Zuchri, 2021:30) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa unit kerja Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang beralamat di Jl. Pramuka Kav 38 Jakarta Timur.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan memaknai data dari data yang didapatkan dari informan dikomparasikan dengan dokumen yang dievaluasi. Analisis deskriptif kualitatif menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi

(SRIKANDI) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

a. Aspek Komunikasi

Komunikasi yang baik berperan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan implementasi *SRIKANDI* di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hal senada diungkapkan oleh Informan 1 yang mengatakan bahwa:

“Komunikasi merupakan hal penting pada setiap tahapan yang perlu dilakukan untuk menyukseskan implementasi kebijakan ini.”

b. Aspek Sumber Daya

Sumber Daya Manusia merupakan aspek utama dalam implementasi kebijakan penggunaan aplikasi *SRIKANDI* sebagai upaya mitigasi arsip kebencanaan di BNPB.

Berikut ungkapan dari Informan :

“Sumber daya yang utama untuk implementasi ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi seperti perangkat komputer, mesin scan dan jaringan internet juga sangat dibutuhkan. SDM baik ASN dan PPPK dan PPNPN telah mendukung implementasi SRIKANDI sampai saat ini”.

“Semua Pegawai harus berperan dalam menjalankan implementasi SRIKANDI dengan dibekali pengetahuan Teknologi Informasi mengenai fitur aplikasi tersebut”.

Hal ini senada dengan teori *George C. Edward III* dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan ini yaitu sumber daya manusia (SDM) sebagai sumber daya utama dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana lainnya seperti pemanfaatan teknologi informasi, jaringan internet, komputer, printer, *scanner* dan sarana prasana lainnya.

c. Aspek Disposisi

Menurut *George C. Edward III* disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti respon, tanggapan, komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

Senada dengan ungkapan informan :

“Secara teknologi, peran SRIKANDI sangat membantu dalam percepatan surat menyurat, tata naskah dinas, dan pendelegasian/disposisi. Respon positif dengan adanya SRIKANDI memang memerlukan penyesuaian waktu, karena hal baru perpindahan dari manual.”(I1).

d. Aspek Struktur Birokrasi

Pembagian tugas dan fungsi tersebut sejalan dengan kebijakan implementasi *SRIKANDI* dalam peningkatan pengelolaan tata naskah dinas di BNPB. Senada dengan ungkapan informan : *“Struktur birokrasi sudah sesuai dengan SOTK yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Masing-masing unit kerja bertahap melaksanakan implementasi SRIKANDI sesuai tupoksinya masing-masing.”* (I1). Diperkuat dengan penyataan informan lainnya *“Dalam Aspek Struktur Birokrasi secara teknologi, peran SRIKANDI sangat membantu dalam percepatan surat menyurat, pendelegasian, maupun tata naskah dinas. Secara berjenjang pelaksanaan tata naskah dilakukan dengan mengacu pada tupoksi serta SOTK yang ditetapkan”*.

Dari Aspek Struktur Birokrasi pada implementasi *SRIKANDI* dalam peningkatan pengelolaan Arsip di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah didukung adanya struktur organisasi yang terdapat dalam *SRIKANDI* yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hambatan dalam implementasi kebijakan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (SRIKANDI) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

a. Aspek Komunikasi

Hambatan yang ditemukan, di antaranya terjadi pada saat implementasi kebijakan ini dimulai, karena adanya penyerapan pemahaman yang belum seragam dan terputusnya komunikasi dalam *system SRIKANDI (system down)*.

Berikut ungkapan dari Informan

“Pada awal implementasi kita terhambat masalah keseragaman penyerapan pemahaman akan tata naskah dinas melalui SRIKANDI ini”.

“Kalau sekarang masalah yang ditemui yaitu system mengalami error/down, sehingga tidak bisa berkomunikasi melalui Aplikasi SRIKANDI”.

Dikaitkan dengan penelitian Aziz, S. A. (2016), terdapat perbedaan hasil penelitian. Aziz, S. A. (2016) mengungkapkan bahwa: “Faktor komunikasi dari pembuat kebijakan turun dalam bentuk pedoman dan panduan teknis”. Sementara temuan peneliti pada aspek komunikasi yaitu bahwa BNPB berkomunikasi dan berkoordinasi antar *stakeholder* terkait dalam mendukung implementasi kebijakan ini tanpa disertai pembuatan kebijakan dalam bentuk pedoman dan panduan teknis yang disertakan oleh ANRI.

b. Aspek Sumber Daya

Hambatan dalam implementasi, seperti yg diungkapkan informan :

“Hambatan SDM pada awal implementasi terjadi karena adanya perbedaan penerimaan dari SDM yang melaksanakan kebijakan ini, karena kemampuan IT yang berbeda-beda. Selain itu, adanya pegawai yang mengalami rotasi ke unit baru menjadikan adanya hambatan dalam pelaksanaan dalam sistem SRIKANDI. Hal lainnya yang kadang terjadi yaitu karena adanya gangguan pada system SRIKANDI itu sendiri hal tersebut dapat terjadi karena adanya gangguan jaringan internet ataupun sistemnya down”.

“Yang sering saya alami yaitu adanya hambatan karena server down, dan jaringan internet tidak stabil atau mati”.

c. Aspek Disposisi

Hambatan yang terjadi ditinjau dari aspek disposisi yaitu terjadi pada saat awal implementasi, di mana para stakeholder terkait merasa khawatir tidak dapat melaksanakan implementasi ini dengan baik. Berikut ungkapan dari informan :

“Pada saat awal, memang terdapat kekhawatiran tidak dapat melaksanakan implementasi dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian mendapatkan respon positif. Saat ini permasalahan terkadang terjadi ketika para pimpinan unit kerja tidak segera merepon ketika ada notifikasi SRIKANDI. Hal ini perlu dimaklumi karena adanya kesibukan para pimpinan unit kerja yang tidak hanya berfokus pada SRIKANDI namun melaksanakan tupoksinya masing-masing yang mengurus waktu dan tenaga. Keberadaan sekipim/pelaksana yang membantu pimpinan mempermudah pelaksanaan tupoksi pimpinan.”.

d. Aspek Struktur Birokrasi

Dari Aspek Struktur Birokrasi pada implementasi SRIKANDI dalam peningkatan pengelolaan Arsip di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah didukung adanya struktur organisasi yang terdapat dalam SRIKANDI yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya dalam mengurangi hambatan dalam implementasi kebijakan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (SRIKANDI) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

a. Aspek Komunikasi

Dikaitkan dengan penelitian Aziz, S. A. (2016), terdapat perbedaan hasil penelitian. Aziz, S. A. (2016) mengungkapkan bahwa: “Faktor komunikasi dari pembuat kebijakan turun dalam bentuk pedoman dan panduan teknis”. Sementara temuan peneliti pada aspek komunikasi yaitu bahwa BNPB berkomunikasi dan berkoordinasi antar stakeholder terkait dalam mendukung implementasi kebijakan ini tanpa disertai pembuatan kebijakan dalam bentuk pedoman dan panduan teknis yang disertakan oleh ANRI.

b. Aspek Sumber Daya

Upaya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, melaksanakan pendampingan langsung dengan menghadirkan personel dari Bagian Tata Usaha dan Kearsipan yang kompeten.

c. Aspek Disposisi

Upaya yang sudah dilakukan apabila ditinjau dari aspek disposisi yaitu dengan penguatan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar rekan kerja serta stakeholder terkait serta dengan penguatan komitmen bersama dalam mensukseskan implementasi kebijakan ini. Berikut ungkapan yang disampaikan oleh informan: *“Solusinya memperkuat komitmen bersama. Komunikasi, koordinasi serta kolaborasi antar stakeholder ditingkatkan. Senantiasa diingatkan untuk selalu menggunakan SRIKANDI dalam hal tata naskah dinas dan kearsipan.”*

“Melaksanakan monitoring yang berkelanjutan setiap bulan guna mengetahui hambatan-hambatan dan mencari solusi terbaik dalam implementasi kebijakan SRIKANDI ini.”

d. Aspek Struktur Birokrasi

Dari Aspek Struktur Birokrasi pada implementasi *SRIKANDI* dalam peningkatan pengelolaan Arsip di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah didukung adanya struktur organisasi yang terdapat dalam *SRIKANDI* yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran implementasi kebijakan penggunaan aplikasi sistem informasi kearsipan terintegrasi (*SRIKANDI*) sebagai upaya mitigasi arsip kebencanaan di BNPB dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan *SRIKANDI* di BNPB ditinjau dari aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi dan aspek struktur birokrasi, disimpulkan bahwa secara umum sudah berjalan dengan cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makasar : CV Syakir Media Press.
- Adra, A., & Permana, I. 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 11(01), 1-12. Pemanfaatan Aplikasi Srikandi Bagi Pegawai Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi.
- Agus Subianto M. 2020. Kebijakan public tinjauan perancangan, implementasi, evaluasi. Brilliant. PT Menuju Insan Cermenlang. Surabaya.
- Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Arisandy, Y., Harpepen, A., & Kurniawan, A. 2017. Sistem Informasi Manajemen (Teori dan Implementasi dalam Bisnis) (A. Sunarto (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Awi, Nadia Nen, and Triesninda Pahlevi 2022. Keefektifan Penerapan Sistem Kearsipan Elektronik (Portal BP Batam) Di Kantor Badan Pengusahaan Batam. *Journal of Office Administration: Education and Practice* 2.2): 132-145.
- Dasnoer, Harvi, Aldri Frinaldi, and Lince Magriasti 2023. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (*SRIKANDI*) di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.16. 2023: 319-324.
- Deddy Mulyadi 2018. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabeta: Bandung
- Deddy Mulyadi. Hendrikus T. Gedeona dan Muhammad Nur Afandi. 2018. Administrasi
- Hartono. 2019. Sistem teknologi informasi: pendekatan terintegrasi, konsep dasar, teknologi, aplikasi, pengembangan dan pengelolaan. Ed. 6. Andi Offset. Yogyakarta.

- Hayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. PT RajaGrafindo Persada: Depok
- Mergel, Ines, Noella Edelmann, and Nathalie Haug. 2019: "Defining digital transformation: Results from expert interviews." *Government information quarterly* 36.4: 101385.
- Neuman. W.L. 2015. Metodologi penelitian sosial: Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif.
- Opan Arifudin, Udin Wahrudin, Fenny Damayanti Rusmana, 2020. Manajemen Risiko Widina. Bandung.
- Pramono, Joko. 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. UNISRI Press. PT. Indeks. Jakarta.
- Safitri, Dyah. 2020. Tantangan Penerapan Rekod dan Arsip Elektronik Bagi Organisasi. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)* 3.1: 3.
- Saryanto, dkk, 2021. Manajemen Risiko: Prinsip dan Implementasi. Media Sains Indonesia. Bandung.
- Sugiyono. 2019. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. ALFABETA. Bandung. Surakarta.
- Suwastini, Ni Luh, Irawaty Igirisa, and Romy Tantu. 2023. Pelayanan Publik pada Pengelolaan Kearsipan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2.7 (2023): 2901-2911..
- Yunda, Nadya Rahma, Sukaesih Sukaesih, and Nurmaya Prahatmaja. 2022. Pengelolaan arsip dinamis dalam menunjang tertib administrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1.7 (2022): 638-648.

Peraturan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.